

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Afan Gafar, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta.
- Gregorius Sahdan, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Pondok Edukasi, Bantul.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jhon Markof, 2002, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2010 *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- S. Tarmudji, 1994, *Profesionalitas Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Bina Aksara, Jakarta.

Satoto, Sukamto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, CV. Hanggar Kreator, Yogyakarta.

Sri Hartini, 2005, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.

Soedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi penelitian Hukum: filsafat, teori dan praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Syaukani, dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang, Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Internet

Akhmad Aulawi, Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/DPR%20P3i%20Akhmad%20Aulawi%20%2oASN_REV.pdf

Amin, Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Pemilukada di Kota Makassar (Pemilihan Wali Kota Tahun 2008), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Bagus Sarnawa, Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25 No. 2, 2018.

Bappenas. Analisis Isu Netralitas ASN/PNS Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Serentak 2015, 2015. [https://www.bappenas.go.id/files/data/politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Netralitas%20PNS %20dalam%20Pilkada.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/data/politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Netralitas%20PNS%20dalam%20Pilkada.pdf)

Fajrul Falaakh, dkk, Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.

Muhadjir Effendy, Jati Diri dan Profesi TNI, UMM Press. Jhones, E.E., & Gerard, H.B., 1967, Foundationa of Social Psychology, Wiley, New York, Malang, 2009.

Nurhasan, Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 6 No. 2, Bandung, 2005.

Rahmat Maulana Winata, dkk, Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).

Risalah Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999.

Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri, jurnal dinamika hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 Januari 2011, hal. 4-6. (dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id)

Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9 No. 3, 2009.

_____, dkk, “Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2014.

SURAT-MENTERI-PANRB-TENTANG-NETRALITAS-ASN-PEMILU-2019-NOMOR-B-94-M.SM.00.00-2019-TANGGAL-26-MARET-2019.pdf
<https://www.kasn.go.id/details/item/386-surat-menteri-panrb-tentang-netralitas-asn-pemilu-2019-nomor-b-94-m-sm-00-00-2019-tanggal-26-maret-2019>

Tedi Sudrajat, Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Politik di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 3, 2011.

_____, Sri Hartini, Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 Tahun 2016.

Teguh Anggoro, Studi Terhadap Respon Masyarakat tentang Pemberian Hak Pilih TNI (studi di wilayah Kodim 0613 Ciamis), Jurnal TAPIS Vol.12 No.2, 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/132836-ID-hak-pilih-tni-studi-terhadap-respon-masy.pdf>

<https://setkab.go.id/pengisian-jabatan-struktural-instansi-sipil-tnipolri/>
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kasn.go.id/details/items/download/1>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a534b2f9f27f/bolehkah-anggota-polri-ikut-pilkada-simak-penjelasan-hukumnya?page=all>

http://eprints.undip.ac.id/17841/1/Z.R.P.TJ._MULYONO.pdf

<Http://beritasore.com/2010/06/23/hakpilih-tni-polri-hak-asasi-personal/>

<http://www.digilib.unila.ac.id/> tinjauan pustaka hak konstitusional

<https://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/mempertimbangkan-hak-pilih-tnikonsistensi-reformasi-tni-dan-demokratisasi-politik-indonesia%C2%B>

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/446902/>

<https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-Pemilihan Umum/#>

